

ANALYSIS OF GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION THROUGH VALUE FOR MONEY APPROACH IN TERMS OF NEW PUBLIC MANAGEMENT AND ITS INFLUENCE ON THE GROWTH IN RIAU PROVINCE

Helly Aroza Siregar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia
Jalan Jend. A. Yani No. 78-88 Pekanbaru 28127

ABSTRACT

The aims of this study are to see the results of financial performance evaluation of Riau Province Government based on Value for Money approach and to see the effect of financial performance on development in Riau Province. The research methods are descriptive analysis and multiple linear regression analysis with the research sample is the financial data of Riau Province consisting of Regional Expenditure, Employee Expenditure, Capital Expenditure, Total Revenue and Local Revenue datas for the last ten years from 2007 to 2016. The results showed that the financial performance of Riau Province Government was in very economical category and effected on Capital Expenditure Growth in Riau Province, even thought this impact was insignificant. The performance of local financial efficiency on average was in efficient category and had no effect on Capital Expenditure Growth in Riau Province, and the performance of local financial effectiveness overall were inefficient and had no effect on Capital Expenditure Growth in Riau Province.

Keywords: Financial Performance; Economical Category; Efficiency Category; Effectiveness Category; Capital Expenditure Growth.

ANALISIS EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH MELALUI PENDEKATAN VALUE FOR MONEY DALAM KONTEKS NEW PUBLIC MANAGEMENT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DI PROVINSI RIAU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan pendekatan *Value for Money* dan melihat pengaruh kinerja keuangan tersebut terhadap pembangunan di Provinsi Riau. Metode penelitian adalah dengan metode deskriptif dan analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan sampel penelitian adalah data keuangan Provinsi Riau yang terdiri dari data Belanja Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Modal, Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau adalah sangat ekonomis dan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau namun tidak signifikan. Kinerja efisiensi keuangan daerah secara rata-rata adalah efisien dan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau. Kinerja efektifitas keuangan daerah secara keseluruhan adalah tidak efisien dan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Ekonomis, Efisien, Efektif, Pertumbuhan Belanja Modal

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban setiap kepala daerah. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah merupakan keharusan dalam mewujudkan *good government governance* atau tata kelola pemerintah yang baik. Tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good government governance* tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Penyajian Laporan Keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah sangat berkaitan dengan konsep New Public Management.

Menurut Bovaird dan Loffler (2013:17) *New Public Management* adalah sebuah gerakan perampingan sektor publik dan membuatnya lebih komparatif dan mencoba untuk membuat administrasi publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga dengan menawarkan pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money*), fleksibilitas pilihan, dan transparansi.

Menurut Mardiasmo (2009: 82) munculnya konsep *New Public Management* berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran publik. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja. Konsep ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan anggaran berbasis kinerja dimana pelaksanaannya harus bersifat transparan dan akuntabel. Dengan demikian maka tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) akan dapat tercapai.

Tabel 1 berikut menunjukkan perbedaan anggaran antara anggaran tradisional dengan anggaran berbasis *New Public Management*:

Anggaran Tradisional	New Public Management
Sentralistik	Desentralisasi & <i>development management</i>
Berorientasi pada input	Berorientasi pada input, output, dan outcome (<i>value for money</i>)
Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang	Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang
<i>Line-item</i> dan <i>incrementalism</i>	Berdasarkan sasaran kinerja
Menggunakan aturan klasik: <i>vote accounting</i>	<i>Zero-base Budgeting, Planning Programming Budgeting System</i>
Prinsip anggaran bruto	Sistematik dan rasional
Bersifat tahunan	<i>Bottom-up budgeting</i>
Spesifik	

Sumber: Mardiasmo (2009: 83)

Berdasarkan tabel di atas maka data diketahui bahwa teori tentang *New Public Management* mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan anggaran berbasis kinerja. Hal ini didasarkan pada kondisi desentralisasi yang menyebabkan Pemerintah Daerah harus dapat mengelola anggaran dengan berorientasi pada *input, output dan outcome*, atau dengan kata lain menggunakan konsep *value for money audit*.

Menurut (Putra & Wirawati, 2015), *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance* yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Sehingga konsep *value for money* ini sangat dibutuhkan sebagai pendukung pengelolaan keuangan daerah dan dana daerah.

Sementara Mardiasmo (2009: 7) menyatakan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah maka perlu dilakukan pengukuran kinerja pemerintah dengan menggunakan metode *value for money audit*.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *value for money* ini sangat penting karena bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola keuangan daerah. Prinsip *value for money* dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya. Artinya, hasil dari pengukuran dengan menggunakan metode *value for money audit* ini menjadi penting karena bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

Pembangunan di daerah sangat ditentukan dengan besarnya alokasi Belanja Modal yang dianggarkan dalam APBD. Hal ini disebabkan karena Belanja Modal merupakan jenis belanja daerah yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Pada kenyataannya, alokasi Belanja Modal tidak selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pertumbuhan Belanja Modal pada APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2007-2016

Tahun Dasar	Belanja Modal	Pertumbuhan Belanja Modal***	Keterangan
2006	162,339,014,710*	-	-
2007	1,508,724,965,300*	829.37	Bertambah
2008	1,195,266,682,620*	(20.78)	Berkurang
2009	1,119,393,868,687*	(6.35)	Berkurang
2010	1,238,786,885,739**	10.67	Bertambah
2011	1,342,180,098,717**	8.35	Bertambah
2012	1,961,665,412,098**	46.16	Bertambah
2013	2,245,307,027,148**	14.46	Bertambah
2014	623,644,302,765**	(72.22)	Berkurang
2015	2,014,487,685,481*	223.02	Bertambah
2016	2,035,635,833,790*	1.05	Bertambah

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, ** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Data Diolah (2018)

Pembangunan akan berjalan dengan lancar dan dilaksanakan secara berkelanjutan jika Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk pembangunan tersebut. Namun demikian, pada tabel di atas dapat diketahui bahwa alokasi Belanja Modal sebagai sumber dana pembangunan di Provinsi Riau berfluktuasi. Hal ini dapat menyebabkan pembangunan yang tidak optimal.

New Public Management

Mardiasmo (2009: 78) menyebutkan bahwa sejak pertengahan 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hirarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Konsep *New Public Management* secara tidak langsung muncul dari kritik keras terhadap organisasi sektor publik dan telah menimbulkan gerakan dan tuntutan terhadap reformasi manajemen sektor publik. *New Public Management* kemudian mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif hampir diseluruh dunia. Pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi pemberian pelayanan publik merupakan penekanan gerakan *New Public Management*. Menurut Mardiasmo (2009: 83) reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya *New Public Management* telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik.

Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi, serta berbagai kekurangan lainnya (Mahmudi, 2007:34). Gambaran ini sesungguhnya sangat merugikan, mengingat fakta bahwa organisasi sektor publik mengelola uang yang sangat besar dari masyarakat. Buruknya pengelolaan organisasi sektor publik mendorong terjadinya reformasi lembaga publik.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2010), kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategi (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Sementara Tika (2010) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja merupakan proses penilaian atau evaluasi terhadap prestasi kerja dalam suatu organisasi.

Kemudian menurut Syafrial (2009), kinerja merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah adalah pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai realisasi anggaran yang akuntabel dalam suatu periode.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka (18), Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengertian Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Modal

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13/2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Menurut Halim (2008: 73), Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Dengan kata lain Belanja Modal merupakan salah satu bagian dari Belanja Langsung, dimana peruntukannya adalah digunakan dalam rangka pembangunan dan pelayanan fasilitas publik.

Value for Money

Value for money menurut Mardiasmo (2009: 4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi berarti pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Value For Money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Konsep *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep *value for money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik (Ardila & Putri, 2015: 29).

Menurut Ulum (2009) *Value for Money (VFM)* menyangkut apa yang dikenal dengan 3 E yaitu: (1) Ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati – hati / cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. (2) Efisiensi adalah perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*Cost of Output*). Efisiensi berhubungan dengan produktifitas. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumberdaya dan dana yang serendah – rendahnya (*spending well*). (3) Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan VFM

Menurut Mahsun (2009: 179) rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran/pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Kriteria ekonomi sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan Pemerintah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
$> 100\%$	Tidak ekonomis
90% - 100%	Kurang ekonomis
80% - 90%	Cukup ekonomis
60% - 80 %	Ekonomis
$< 60\%$	Sangat ekonomis

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996

Halim (2008: 164) menyebutkan bahwa efisiensi dinyatakan dalam rasio efisiensi. Hal itu berarti bahwa rasio menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Kriteria efisiensi sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
$> 100\%$	Sangat efisien
90% - 100%	Efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80 %	Kurang efisien
$< 60\%$	Tidak efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996

Halim (2008: 234) menyatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kriteria efektivitas sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
$> 100\%$	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80 %	Kurang efektif
$< 60\%$	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nugrahani (2007) membuktikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah DIY cukup ekonomis. Kinerja keuangan pemerintah yang terbukti ekonomis dibuktikan pula oleh Ariana, dkk (2012), Andriani (2013), Sari (2015), bahkan Putra dan Wirawati (2015) membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah sangat ekonomis. Kurrohman (2013) juga membuktikan bahwa Pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Namun Ardila & Putri (2015), membuktikan sebaliknya dimana kinerja keuangan pemerintah tidak ekonomis.

Kinerja keuangan pemerintah yang efisien dibuktikan oleh penelitian Nugrahani (2007), Ariana, dkk (2012), Andriani (2013), Sari (2015), Putra dan Wirawati (2015), Julita (2015) dan Hidayat & Riharjo (2015). Namun Gozaliem (2013) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah ternyata tidak efisien. Hal ini juga didukung dengan penelitian dari Pangkey dan Pinatik (2015) juga Ardila & Putri (2015) membuktikan dimana kinerja keuangan pemerintah daerah ternyata tidak efisien.

Kinerja keuangan pemerintah yang efektif dibuktikan oleh Ariana, dkk (2012), Purnamasari (2014), Hidayat & Riharjo (2015), Ardila & Putri (2015), Sari (2015). Putra dan Wirawati (2015) membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah sangat efektif. Namun Nugrahani (2007) membuktikan sebaliknya dimana kinerja keuangan pemerintah pada kenyataannya masih kurang efektif. Demikian pula dengan Kadafi (2014) yang menyatakan bahwa efektifitas masih belum maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menjelaskan hasil rasio *Value For Money* untuk melihat kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau apakah sudah berjalan dengan

ekonomis, efisien dan efektif. Untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan evaluasi *Value For Money* maka langkah pertama adalah menentukan apakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau sudah memenuhi kriteria efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan kriteria dari Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996 yang dapat dilihat pada Tabel 2, 3 dan 4 di atas.

Untuk menghitung kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau melalui metode *Value for Money*, dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ekonomis, menurut Ardila dan Putri (2015) merupakan perbandingan antara masukan yang terjadi (*input*) dengan nilai masukan yang seharusnya (nilai *input*). Sementara ekonomi menurut Mardiasmo (2009: 4) merupakan perbandingan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Kemudian menurut Mahsun (2009: 179) rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Ekonomis dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100 \%$$

Nilai input adalah Belanja Daerah karena nilai input yang akan digunakan untuk menjalankan anggaran secara keseluruhan berasal dari dana Belanja Daerah. Sementara *input* dalam penelitian ini adalah Belanja Pegawai sementara Nilai Input adalah Belanja Daerah. Belanja Pegawai menjadi *input* karena untuk melaksanakan seluruh mekanisme anggaran maka diperlukan pegawai untuk melaksanakannya, dengan demikian maka pegawai pemerintah daerah diberikan gaji sebagai balas jasa atas pekerjaannya yaitu dalam bentuk Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit Belanja Pegawai yang dialokasikan untuk melaksanakan Belanja Daerah maka dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah semakin ekonomis.

Efisiensi, menurut Ardila dan Putri (2015) merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu (*input*) atau penggunaan masukan terendah. Efisiensi dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 \%$$

Output dalam rumusan ini adalah Pendapatan Daerah sementara input yang digunakan adalah Belanja Daerah. Output merupakan pencapaian yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah sehingga Pendapatan Daerah menggambarkan seberapa banyak pencapaian keuangan yang diperoleh daerah dengan menggunakan *input* yang ada yaitu Belanja Daerah.

Efektifitas, menurut Ardila dan Putri (2015) merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektifitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcomes}}{\text{Output}} \times 100 \%$$

Outcomes merupakan capaian yang berhasil diraih oleh Pemerintah Daerah, sehingga *outcomes* dalam rumusan di atas adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan keluaran dari kinerja keuangan pemerintah daerah karena menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri tanpa bantuan dari luar (Pusat). sementara *output* adalah Pendapatan Daerah.

Setelah memperoleh hasil dari penghitungan ketiga rasio di atas maka hasilnya akan disandingkan dengan rasio pertumbuhan Belanja Modal, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{BM_n - BM_{n-1}}{BM_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

BM_n = Belanja Modal pada tahun berjalan

BM_{n-1} = Belanja Modal tahun berjalan dikurangi Belanja Modal tahun sebelumnya

Langkah selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS untuk melihat pengaruh Ekonomis Kinerja Keuangan (X_1), Efisiensi Kinerja Keuangan (X_2) dan Efektivitas Kinerja Keuangan (X_3) terhadap Pertumbuhan Belanja Modal (Y). Sebelum melakukan uji regresi maka dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik untuk melihat apakah model regresi sudah baik dan layak untuk dilakukan pengujian. Adapun model regresi pada penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Melalui Pendekatan Value for Money dalam Konteks *New Public Management* dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan di Provinsi Riau (Helly Aroza Siregar)

Y = Pertumbuhan Belanja Modal
 X1 = Ekonomis Kinerja Keuangan
 X2 = Efisiensi Kinerja Keuangan
 X3 = Efektifitas Kinerja Keuangan
 e = error

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Rasio Ekonomi Kinerja Keuangan

Hasil uji rasio ekonomi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Rasio Ekonomi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Pegawai	Rasio Ekonomi	Kriteria
2007*	3,726,765,114,050	868,254,274,940	23.30	Sangat Ekonomis
2008*	3,657,889,802,469	896,176,629,470	24.50	Sangat Ekonomis
2009*	3,757,480,844,229	910,402,348,184	24.23	Sangat Ekonomis
2010**	3,791,406,471,379	945,974,032,438	24.95	Sangat Ekonomis
2011**	4,265,129,660,304	936,141,543,993	21.95	Sangat Ekonomis
2012**	6,670,765,136,944	1,037,795,827,289	15.56	Sangat Ekonomis
2013**	7,525,282,506,040	1,197,323,164,780	15.91	Sangat Ekonomis
2014**	5,602,074,495,738	1,125,446,031,248	20.09	Sangat Ekonomis
2015*	7,760,972,468,295	1,195,181,661,127	15.40	Sangat Ekonomis
2016*	8,731,938,149,823	1,295,797,050,729	14.84	Sangat Ekonomis

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, ** BPKAD Provinsi Riau, Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam sepuluh tahun terakhir kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau berada dalam kriteria “sangat ekonomis”

Hasil Uji Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan

Hasil uji rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau

Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria
2007*	3,726,765,114,050	3,413,009,702,200	91.58	Efisien
2008*	3,657,889,802,469	4,209,288,614,510	115.07	Sangat Efisien
2009*	3,757,480,844,229	3,231,912,090,401	86.01	Cukup Efisien
2010**	3,791,406,471,379	4,305,465,216,039	113.56	Sangat Efisien
2011**	4,265,129,660,304	5,440,440,485,157	127.56	Sangat Efisien
2012**	6,670,765,136,944	6,847,315,819,648	102.65	Sangat Efisien
2013**	7,525,282,506,040	6,994,646,204,554	92.95	Efisien
2014**	5,602,074,495,738	8,132,409,891,832	145.17	Sangat Efisien
2015*	7,760,972,468,295	7,407,059,641,183	95.44	Efisien
2016*	8,731,938,149,823	6,942,926,673,091	79.51	Kurang Efisien

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, ** BPKAD Provinsi Riau, Data Diolah (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada kriteria yang beragam. Pada tahun 2007 kinerja keuangan pemerintah berada pada kriteria ‘efisien’, kemudian kinerja ini meningkat pada tahun 2008 menjadi ‘sangat efisien’. Namun demikian, pada tahun 2009 kinerja pemerintah menurun menjadi ‘cukup efisien’, sementara pada tahun 2010 sampai dengan 2015 kinerja pemerintah meningkat kembali, akan tetapi pada tahun 2016 berada pada tingkat kinerja terendah dengan kriteria ‘kurang efisien’.

Hasil Uji Rasio Efektifitas Kinerja Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi PAD masih berada di bawah Pendapatan Daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari luar dan belum mandiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau selama sepuluh tahun terakhir masih berjalan dengan ‘tidak efektif’.

Hasil uji rasio efektifitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio Efektifitas	Kriteria
2007*	3,413,009,702,200	3,413,009,702,200	36.83	Tidak Efektif
2008*	4,209,288,614,510	4,209,288,614,510	36.16	Tidak Efektif
2009*	3,231,912,090,401	3,231,912,090,401	41.85	Tidak Efektif
2010**	4,305,465,216,039	4,305,465,216,039	39.51	Tidak Efektif
2011**	5,440,440,485,157	5,440,440,485,157	40.62	Tidak Efektif
2012**	6,847,315,819,648	6,847,315,819,648	37.81	Tidak Efektif
2013**	6,994,646,204,554	6,994,646,204,554	38.97	Tidak Efektif
2014**	8,132,409,891,832	8,132,409,891,832	39.90	Tidak Efektif
2015*	7,407,059,641,183	7,407,059,641,183	46.94	Tidak Efektif
2016*	6,942,926,673,091	6,942,926,673,091	44.80	Tidak Efektif

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, ** BPKAD Provinsi Riau, Data Diolah (2018)

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Setelah dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik maka diperoleh hasil bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi normalitas, kemudian tidak terjadi multikolinearitas dan heterokedastisitas. Dengan demikian maka dilakukan uji regresi linear berganda dengan hasil sebagai berikut.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.465 ^a	.217	-.175	288.83055

a. Predictors: (Constant), Efektifitas, Efisiensi, Ekonomis

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Belanja Modal

Sumber: Hasil Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien (R^2) adalah sebesar 0,217. Hal ini berarti variabel independen yaitu kinerja keuangan dari aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Belanja Modal sebesar 21,7% sedangkan sisanya yaitu 78,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

Hasil Hipotesis

Uji t digunakan untuk menilai pengaruh dari variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat kesalahan alpha (α) = 5%. Uji t digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ho₁ : $\rho = 0$ Kinerja ekonomi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.

Ha₁ : $\rho \neq 0$ Kinerja ekonomi keuangan daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.

Ho₂ : $\rho = 0$ Kinerja efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.

Ha₂ : $\rho \neq 0$ Kinerja efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.

Ho₃ : $\rho = 0$ Kinerja efektifitas keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.

Ha₂ : $\rho \neq 0$ Kinerja efektifitas keuangan daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun hasil uji regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1326.209	1771.850		.748
	Ekonomis	9.522	26.640	.151	.733
	Efisiensi	-6.003	5.080	-.459	.282
	Efektifitas	-19.434	33.048	-.249	.578

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Belanja Modal

Sumber: Hasil Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: (1) Persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 1326,209 + 9,522 X_1 - 6,003 X_2 - 19,434 X_3 + e$$

(2) Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung pada X_1 adalah 0,357 dengan sig. 0,733 lebih besar dari 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kinerja ekonomi keuangan daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau namun tidak signifikan. (3) Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung pada X_2 adalah -1,182 dengan sig. 0,282 lebih besar dari 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kinerja efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau. (4) Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung pada X_3 adalah -0,588 dengan sig. 0,578 lebih besar dari 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kinerja efektifitas keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.

PEMBAHASAN

New Public Management pada dasarnya mengarahkan Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik agar dapat menyelenggarakan keuangan yang dikelolanya dengan memenuhi prinsip *value for money* yaitu pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka diharapkan pembangunan di daerah akan meningkat dan berkembang ke arah yang positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada periode tahun anggaran 2007 sampai dengan 2016 secara umum adalah 'sangat ekonomis'. Artinya rasio ekonomi tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah, dengan hasil bahwa pengeluaran dari anggaran untuk Belanja Pegawai berada dalam kategori yang sangat ekonomis jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan Belanja Pegawai tersebut. Belum terdapat ukuran yang ideal tentang berapa proporsi yang baik dari biaya yang dikeluarkan dalam bentuk Belanja Pegawai untuk melaksanakan anggaran dengan optimal. Sehingga implikasinya adalah kinerja keuangan yang ekonomis ini memberikan pengaruh pada pertumbuhan pembangunan di daerah yang diukur dengan pertumbuhan Belanja Modal namun sangat kecil dan tidak signifikan.

Sementara kinerja keuangan berada dalam kriteria yang 'sangat ekonomis' selama sepuluh tahun berturut-turut, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau berada dalam kriteria yang 'kurang efisien' pada tahun 2016, kemudian berada pada kriteria 'cukup efisien' pada tahun 2009, berada pada kriteria 'efisien' pada tahun 2007, 2013 dan tahun 2015, dan berada pada kriteria 'sangat efisien' pada tahun 2008, 2010, 2011, 2012, dan 2014. Kinerja keuangan yang menunjukkan kriteria beragam ini pada akhirnya tidak memberikan pengaruh pada pembangunan di Provinsi Riau yang diukur dengan pertumbuhan Belanja Modal.

Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau berada dalam kriteria yang 'tidak efektif' selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi PAD yang jauh lebih kecil dari Pendapatan Daerah. Artinya, keuangan Pemerintah Provinsi Riau masih sangat mengandalkan bantuan dari luar sehingga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih belum optimal dalam meraih pendapatan secara mandiri di daerah. Kinerja keuangan pemerintah yang masih 'tidak efektif' ini jelas menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan di Provinsi Riau ini.

Idealnya, kinerja keuangan yang baik dengan memenuhi kriteria *value for money* sudah seharusnya memberikan pengaruh pada kinerja pembangunan yang baik. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak demikian, dimana kinerja yang 'sangat ekonomis' dan efektif pada kenyataannya tidak mempengaruhi keputusan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan alokasi Belanja Modal yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan di Provinsi Riau ini. Hal ini dapat disebabkan karena adanya hambatan-hambatan dalam pengalokasian Belanja Modal tersebut yang dapat disebabkan karena keputusan politik di pemerintahan. Namun demikian dugaan ini masih belum diteliti.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau adalah sangat ekonomis. Meski berfluktuasi selama sepuluh tahun terakhir namun secara rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau adalah efisien. Sementara itu, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau adalah masih tidak efektif. (2) Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Belanja Modal sebesar 21,7%. (3) Kinerja ekonomi keuangan daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau namun tidak signifikan. (4) Kinerja efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau. (5) Kinerja efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Riau.

Kemudian saran yang dianjurkan diantaranya sebagai berikut: (1) Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya menjadi lebih baik dan stabil atau meningkat dari waktu ke waktu sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan. (2) Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Riau agar dapat meningkatkan jumlah alokasi Belanja Modal sehingga pembangunan di daerah akan semakin optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardila, Isna dan Ayu Anindya Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Volume 15 (1) : 78 – 85.
- Ariana, Hermawati, Suharyono dan Dwi Risma Devianti. 2012. *Analisis Pendapatan Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bovaird, T.Loffer, E., 2013, *Public Management and Governance*, New York, Routledge.
- Buhr, N., 2010, *From Cash to Accrual and Domestic To International Government Accounting Standard Setting in Last 30 Years*, Makalah disajikan pada *Sixth Accounting History Internaional Conferenc*, Wellington 19 August.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Taufik Wahyu dan Ikhsan Budi Riharjo. 2015. *Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 11.
- Kadafi, Laode. 2014. *Pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang*.
- Kurrohman, Taufik. 2013. *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang berbasis Value For Money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 5, No. 1, pp. 1-11.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. UPP AMP YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo.. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nugrahani, Tri Siwi. 2007. *Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Akmenika UPY*. Volume I.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Putra, Agus Purnomo Adi dan Ni Gusti Putu Wirawati. 2015. *Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 11.1 : 252-268.
- Sari, Nindy Cahya Feriska. 2015. *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)*.
- Syafrial. 2009. *Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Tika, Moh. Pabundu. 2010. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ulum, MD Ihyanul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah